

**CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMPROV
JAMBI TAHUN 2025
(Data s.d. September 2025)**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	80 Skor	76,92 Skor	96,15%	Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat profesionalitas aparatur sipil negara berdasarkan empat dimensi utama, yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin . Indeks ini mencerminkan sejauh mana ASN telah memenuhi standar yang ditetapkan dalam mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.	BKD (Bidang PA & Bidang PKAP)
		Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	300 Skor	253 Skor	84,33%	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN merupakan ukuran tingkat keberhasilan instansi dalam mengelola ASN berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil tanpa diskriminasi. Capaian indeks ini mencerminkan penerapan delapan aspek utama, yaitu perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian dan penghargaan, perlindungan ASN, serta sistem informasi kepegawaian. Nilai indeks digunakan sebagai tolok ukur profesionalisme birokrasi sekaligus dasar evaluasi, pembinaan, dan pengambilan kebijakan dalam peningkatan kualitas manajemen ASN dan pelayanan publik	BKD (Semua Bidang)
2	Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang baik	Predikat AKIP	BB	BB	100,00%	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah merupakan hasil penilaian atas tingkat akuntabilitas dan kualitas kinerja organisasi dalam melaksanakan program serta kegiatan yang mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah. Predikat AKIP mencerminkan sejauh mana perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja dikelola secara efektif, efisien, transparan, serta berorientasi pada hasil. Nilai dan predikat AKIP digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja perangkat daerah sekaligus tolok ukur komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).	BKD (Sekretariat)

		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawain	84,5 Skor	89,39 Skor	105,79%	Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah merupakan ukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan perangkat daerah, yang mencakup aspek persyaratan, prosedur, waktu, biaya, produk layanan, kompetensi dan perilaku pelaksana, sarana prasarana, serta penanganan pengaduan. Indeks ini mencerminkan persepsi masyarakat atas kecepatan, ketepatan, transparansi, serta keramahan dalam pelayanan, sekaligus menjadi dasar evaluasi kinerja pelayanan publik, acuan peningkatan kualitas, dan tolok ukur akuntabilitas perangkat daerah dalam memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat.	BKD (Sekretariat)
1	Meningkatnya konektivitas nasional, regional dan lokal	Rasio konektivitas	54,2	Jan – Des 2025			Dinas Perhubungan
		KinerjaLalu Lintas	0,55				Dinas Perhubungan
		On time performance layanan transportasi	89,2				Dinas Perhubungan
2	Meningkatnya akuntabilitaskinerja dankualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP	B (64,5)	Jan-Des 2025			Dinas perhubungan
		Indeks Kepuasan Masyarakat	77,2				Dinas perhubungan

3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Akuntabilitas Kinerja	1. Predikat AKIP Perangkat Daerah 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 (Nilai) 91,5 (nilai)	Jan-Des 2025			Bappeda
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi yang Integratif Dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi Serta berdampak Pada Sasaran Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan pembangunan Nasional Provinsi Jambi	87,5 (Nilai))				Bappeda
4	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih , baik dan berwibawa	Meningkatnya kualitas Layanan Publik	IKM	Jan-Des 2025		Melalui Kuistioner Laporan Hasil Evaluasi	BPKPD
5	Meningkatnya tata kelola Keuangan yang Transparan dan akuntabel	Meningkatnya transparansi dan akuntabel kinerja pengelolaan keuangan daerah	Nilai AKIP				
		Meningkatnya kualitas manajemen baarang milik daerah	Persentase pengamanan barang milik daerah Kontribusi barang milik daerah kepada Pemerintah Daerah				

6	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan daerah I	Meningkatnya pembangunan daerah	Persentase peningkatan PAD				
7	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Persentase tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Tahun Anggaran N-1. Capaian Kinerja (Realisasi Kinerja : Target Kinerja) x 100% Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 Nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	85,60 % 73 % 3,085	Jan-Des 2025		Berdasarkan Persentase tindak hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi yang telah selesai ditindaklanjuti terhadap seluruh jumlah hasil rekomendasi Pemeriksaan Inspektorat Provinsi dikalikan 100%. Berdasarkan persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Jambi dilakukan dengan cara jumlah hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Jambi yang telah ditindaklanjuti dibagi jumlah temuan dikalikan 100% Capaian kinerja = (realisasi kinerja : Target Kinerja) x 100%. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan BPKP perwakilan Provinsi Jambi atas Penilaian Mandiri (PM) yang telah dilaksanakan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi didasarkan atas penilaian pada 3 komponen yaitu penetapan komponen, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan. Capaian Kinerja = (Realisasi Kinerja : Target Kinerja) x 100%	Inspektorat

		Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP)	3,04			Berdasarkan hasil evaluasi atas penilaian Mandiri kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yang dilaksanakan oleh BPKP Nomor 8 tahun 2021. Capaian Kinerja = (Realisasi Kinerja : Target Kinerja) x 100 %.	
8	Meningkatnya Implementasi Kebijakan Pembangunan Provinsi Jambi	Persentase rekomendasi kebijakan Pembangunan yang Dilaksanakan	75	75	100%	TELAH MEMENUHI TARGET SAMPAI DENGAN TRIWULAN III	ADMPem
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja (Nilai AKIP)	75	75	100%	TELAH MEMENUHI TARGET SAMPAI DENGAN TRIWULAN III	ADMPem
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai IKM)	75	75	100%	TELAH MEMENUHI TARGET SAMPAI DENGAN TRIWULAN III	ADMPem

--	--	--	--	--	--	--	--